

ABSTRACT

In order to increase public welfare , local government re-establishing of planning to budget implementation . Efforts to manage the budget used regional government programs accomplished required a regional financial supervision. Financial monitoring regions can accomplished required the role of the members of the external as an institution control power local government, but they also need to watch regional financial so as to make no misuse budget. This study aims to to give evidence empirical about the influence of knowledge council s about budgets to financial monitoring the apbd , the influence of accountability , public participation , and transparency public policy can moderating to relations council knowledge about budget by financial monitoring the apbd , Survey to members of the dprd of kabupaten tegal referring to research conducted by patiar , sri rustiyaningsih , and dwi handayani (2014) .

The study is done in the office of district council tegal .The kind of research this is data subject (data self-report) with primary data in the form of a questionnaire that is sourced from respondents directly . The population this research council members include the district tegal while sample determination by using the method of sampling population. Sample of this research is all members of parliament will be as many as 50 but only 36 questionnaires back. The method of analysis that is used is moderated regression analysis (mra) run with the software statistical product and service solution (spss) used to analyze data.

This research result indicates that the influence of the board knowledge about budgets have had a positive impact and significant financial monitoring against local. Accountability and transparency public policy can moderating to relations council knowledge about budget by financial monitoring the APBD, While public participation cannot moderating relations council of knowledge about budgeting under the financial (APBD).

Keywords : *knowledge of the board about the budget, knowledge about budgeting under the financial (APBD). accountability and transparency public policy, and public participation,*

ABSTRAK

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah menata kembali dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Upaya mengelola anggaran yang digunakan program pemerintah daerah terlaksana dengan baik diperlukan suatu pengawasan keuangan daerah. Pengawasan keuangan daerah dapat terlaksana dengan baik diperlukan peran anggota DPRD sebagai lembaga pengontrol eksternal kekuasaan pemerintah daerah, namun masyarakat juga perlu mengawasi keuangan daerah untuk memastikan tidak ada penyelewengan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik dapat memoderasi terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD), survey pada anggota DPRD Kabupaten Tegal yang merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Patiar, Sri Rustiyaningsih, dan Dwi Handayani (2014).

Penelitian ini dilakukan di Kantor DPRD Kabupaten Tegal. Jenis penelitian ini adalah data subjek (*self-report data*) dengan data primer berupa kuesioner yang bersumber dari responden secara langsung. Populasi penelitian penelitian meliputi anggota DPRD yang ada di Kabupaten Tegal sedangkan penentuan sampel dengan menggunakan metode populasi sampling. Sampel penelitian ini adalah semua anggota DPRD sebanyak 50 akan tetapi hanya 36 kuesioner yang kembali. Metode analisis yang digunakan adalah Moderated Regression Analysis (MRA) yang dijalankan dengan perangkat lunak Statistical Product and Service Solution (SPSS) digunakan untuk menganalisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Akuntabilitas publik dan transparansi kebijakan publik dapat memoderasi terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD), sementara partisipasi masyarakat tidak dapat memoderasi terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Kata kunci : Pengetahuan Dewan tentang Anggaran, pengawasan keuangan daerah (APBD), akuntabilitas publik, partisipasi, masyarakat, dan transparansi kebijakan publik